



LAPORAN KINERJA 2025

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATU BARA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara, Serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturab Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaopran Kinerja dan Riview atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekak yang kuat untuk menginformasikan capain kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

Secara keseluruhan penyenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perikanan dan Peternakan KAbupaten Batu Bara telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indicator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabuapten Batu Bara Tahun 2025.

Perupuk, 31 Januari 2026

Pli. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Batu Bara



Antoni Ritonga, SP

Nip.19690529 199303 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas yang telah dicanangkan pada tahun 2025. Berikut adalah rincian dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicapai.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|--|--|--------|--------|-----------|-------|
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB | Persen | 2,78 | Na | |
| | | Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan) | Persen | 5 | 3,97 | 79,48 |
| 2 | Meningkatnya Produksi Ternak Unggulan | Kontribusi Sub Sektor Peternakan Pada PDRB | Persen | 0,80 | Na | |
| | | Produksi Daging Sapi | Ton | 700 | 729,41 | 104,2 |
| | | Produksi Daging Kambing | Ton | 20 | 19,06 | 95,3 |
| | | Produksi Daging Domba | Ton | 60 | 54,9 | 91,5 |
| | | Produksi Telur | Ton | 260 | 240,97 | 92,68 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Nilai | 80,20 | 80,20 | 100 |



Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 5 (lima) diantaranya telah mencapai target dengan kategori **sangat baik** dan 1 (satu) indicator belum mencapai target dengan kategori **Baik** sedangkan indicator kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Sub Sektor Peternakan dalam PDRB sampai pada laporan kinerja ini di buat data kontribusi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara. Artinya dapat dinyatakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 pada tingkat kategori **Tinggi** walaupun 1 (satu) indicator yang belum mencapai target. Akan tetapi masih banyak tantangan dan permasalahan yang masih belum dapat diatasi dalam pengembangan pembangunan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara terutama kesejahteraan pelaku utama serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2026 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara akan merencanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan dengan mempertajam program/kegiatan dan menganalisis permasalahan dan peluang disetiap indikator dengan memperhatikan kondisi perkembangan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara demi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor perikanan dan peternakan guna mencapai tujuan utama yaitu peningkatan ekonomi Masyarakat Kabupaten Batu Bara.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025, maka



LKjIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan kepada Bupati Batu Bara.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini adalah sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal ini pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini ditujukan:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Peternakan Batu Bara;
- d. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara;
- e. Meningkatkan Kredibilitas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah/Delegasi Wewenang;
- f. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.



1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara

a. Kedudukan

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan kemudian melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 61 tahun 2022 tentang Tugas dan Pokok Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara menjabarkan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan peternakan. Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perikanan dan peternakan;
- e. pembinaan terhadap uptd dan kelompok jabatan fungsional dinas perikanan dan peternakan;
- f. pemberian petunjuk dan arahan kepada sekretaris, kepala bidang dan unit pelaksana teknis agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang dan unit pelaksana teknis secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- h. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dalam bidang perikanan dan peternakan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- i. menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan dinas perikanan dan peternakan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/ wakil bupati dan sekretaris daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :



- a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
- c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada dinas perikanan dan peternakan serta uptd;
- d. pengkoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi standar operasional prosedur (sop);
- g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada para subbagian agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku serta mengkoordinasikan para kepala sub bagian di lingkungan sekretariat baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- h. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sekretariat dinas perikanan dan peternakan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan sumberdaya manusia. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah :



- a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
- b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana;
- d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya manusia;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
- g. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja dinas perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- h. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. pelaporan pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban dan penilaian atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris.

b. Tim Substansi Program dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan administrasi rencana program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. penyusunan administrasi rencana program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program, kegiatan, anggaran, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;



- e. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator program dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris.
- c. Tim Substansi Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional**

Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- f. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator keuangan dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris.

3. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan perikanan tangkap dan pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengendalian tugas administratif dan teknis operasional bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;



- c. pelaksanaan pengelolaan data sumber daya pesisir, perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan usaha perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pengembangan, pembangunan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan tangkap;
- g. pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil;
- h. pelaksanaan sosialisasi hukum dan peraturan perikanan, koordinasi pengawasan dan kerjasama antar wilayah;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perikanan tangkap dan sumber daya perikanan;
- j. pelaksanaan penyusunan rencana pelestarian dan rehabilitasi kawasan pesisir, penanganan bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim, dan serta koordinasi perlindungan sumber daya perikanan;
- k. pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- l. pelaksanaan rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap;
- m. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- n. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

a. Tim Substansi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi program kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pemanfaatan sumber daya perikanan;



- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis standarisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan dan penanganan ikan di atas kapal;
- d. pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
- f. pelaksanaan verifikasi teknis kelayakan usaha penangkapan ikan;
- g. pelaksanaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan nelayan kecil;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan tangkap;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan tangkap;
- k. pelaksanaan rekomendasi ketelusuran hasil perikanan tangkap;
- l. pelaksanaan rekomendasi penyaluran dan pemanfaatan bbm untuk nelayan;
- m. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- n. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.

b. Tim Substansi Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi program kegiatan di bidang pengendalian sumber daya perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah:



- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pengendalian sumber daya perikanan;
- b. pelaksanaan identifikasi pemanfaatan sumber daya perikanan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan sumber daya perikanan secara terpadu;
- d. pelaksanaan pembinaan mitigasi bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan perairan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi kerusakan sumber daya perikanan;
- f. pelaksanaan pemulihan stok sumber daya ikan di perairan;
- g. pelaksanaan pembinaan tentang hukum dan peraturan perikanan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan di perairan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelengkapan izin penangkapan ikan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi usaha perikanan tangkap dan pengadaan kapal penangkap ikan;
- k. pelaksanaan fasilitasi penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan;
- l. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas);
- n. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- o. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Subkoordinator Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.



4. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. pelaksanaan pengendalian tugas administratif dan teknis operasional bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- c. pelaksanaan penyusunan profil data usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sarana prasarana di kawasan budidaya;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem kesehatan ikan di lingkungan budidaya;
- g. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang budidaya;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem produksi usaha budidaya perikanan;
- i. pelaksanaan pengembangan sistem perbenihan perikanan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. pelaksanaan identifikasi penumbuhan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan kemitraan akses permodalan dan investasi usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- m. pelaksanaan pembinaan penanganan pasca panen, diversifikasi produk olahan dan teknologi produk olahan hasil perikanan;
- n. pelaksanaan pembinaan penerapan standarisasi mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;



- o. pelaksanaan penjaminan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi serta promosi produk hasil perikanan;
- q. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- r. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

a. Tim Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha serta kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan analisis dan pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pembinaan dan bimbingan penerapan jaminan mutu serta keamanan pangan produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- f. pembinaan dan pengembangan produk perikanan non konsumsi;
- g. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, peningkatan kelas kelompok dan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap skala usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;



- j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan akses pasar dan promosi produk perikanan;
- k. pelaksanaan pengelolaan informasi harga produk perikanan;
- l. pelaksanaan penyusunan rencana distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan daerah;
- m. pelaksanaan pembinaan sanitasi dan hygiene produk perikanan kepada pelaku usaha dan kelompok pemasar produk perikanan;
- n. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- o. penilaian prestasi kerja bawahan di Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

b. Tim Substansi Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha budidaya ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi budidaya ikan air payau, laut dan air tawar;
- b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha budidaya ikan air payau, laut dan air tawar;
- c. pelaksanaan bimbingan penggunaan sarana budidaya ikan air payau, laut dan air tawar, dan bimbingan pembuatan pakan dengan menerapkan standar budidaya yang baik dan benar;
- d. pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang budidaya ikan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan komoditas ikan unggulan, serta inovasi dan adaptasi teknologi budidaya ikan;



- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian peredaran induk dan benih ikan sesuai standar nasional indonesia;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan ikan, pembinaan, monitoring pada usaha budidaya ikan;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan untuk kegiatan usaha budidaya ikan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan kesehatan ikan, dan identifikasi kebutuhan sarana produksi usaha budidaya ikan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha budidaya ikan;
- k. pelaksanaan identifikasi, penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha budidaya ikan;
- l. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- m. penilaian prestasi kerja bawahan di Subkoordinator Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan perbibitan dan produksi, keswan dan kesmavet serta bina usaha dan pemasaran;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;



- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, keswan dan pemasaran;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam usaha peternakan, investasi dan pemasaran;
- h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- i. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- m. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Tim Substansi Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbibitan dan produksi ternak;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pakan, dan produksi di bidang peternakan;



- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, perbibitan ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (hpt);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hpt;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit hpt;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi ternak;
- k. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- l. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Tim Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;



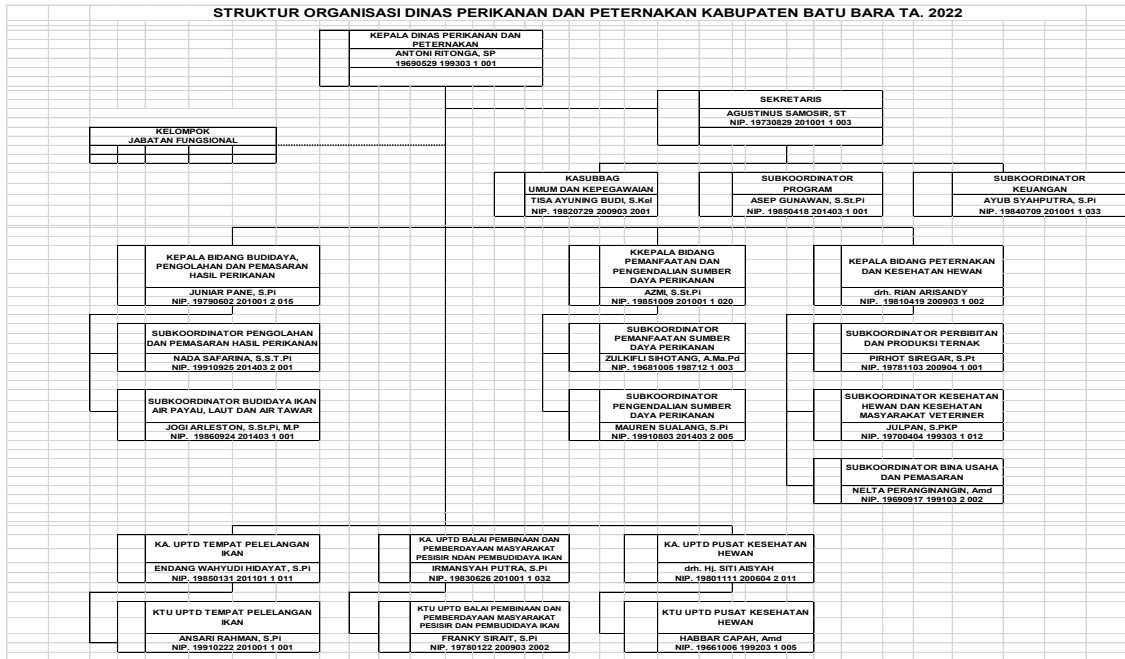
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- j. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- k. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- l. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- m. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- q. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



c. Tim Substansi Bina Usaha dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Bina Usaha dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di seksi bina usaha dan pemasaran hasil peternakan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- e. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- f. memfasilitasi promosi dan kerjasama / kemitraan hasil produk, usaha peternakan dan pemasaran;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- i. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- j. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator bina usaha dan pemasaran dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara terdiri sumber daya manusia dan aset sarana dan prasarana , uraian dari masing-masing sumberdaya adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya manusia

Sumber daya Dinas Perikanan dan Peternakan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara terdiri dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yaitu:

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

| No | Pendidikan | 2023 | % |
|----|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | Pasca Sarjana | 6 Orang | 10 |
| 2 | Sarjana | 42 Orang | 70 |
| 3 | Diploma III | 6 Orang | 10 |
| 4 | Diploma II | 1 Orang | 1,6 |
| 5 | SLTA | 5 Orang | 8,3 |
| | Jumlah | 60 Orang | 100% |

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara tahun 2025



Tabel 3. Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

| No | Pendidikan | Uraian |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 1 | Kepala Dinas | 1 Orang |
| 2 | Sektretaris | 1 Orang |
| 3 | Kepala Bidang | 3 Orang |
| 4 | Kasi/Kasubag/Katua Tim Substansi | 10 Orang |
| 5 | Kepala UPTD | 3 Orang |
| 6 | Kepala TU UPTD | 3 Orang |
| 5 | Staf | 39 Orang |
| | Jumlah | 60 Orang |

2.2.2 Aset Sarana Prasarana

Uraian Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Sebagai Berikut :

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara

| No. | Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan | Jumlah |
|-----|---|---------|
| 1 | Gedung Kantor ($\pm 771,75 \text{ m}^2$) | 1 Unit |
| 2 | Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 4 Unit |
| 3 | Balai Pelatihan Sekaya Maritim | 1 Unit |
| 4 | Kendaraan Roda Empat | 7 Unit |
| 5 | Kendaraan Roda 6 | 1 Unit |
| 6 | Kendaraan Roda Dua | 18 Unit |
| 7 | Kapal Motor | 1 Unit |
| 8 | Pasar Hewan | 1 Unit |
| 9 | Pusat Kesehatan Hewan | 1 Unit |
| 10 | Pusat Kesehatan Hewan Pembantu | 2 Unit |
| 11 | Pos Pelayanan Insensinasi Buatan (IB) | 2 Unit |

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara



1.4 Isu – Isu Strategis Pengembangan Sektor Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara

1. Produksi Hasil Budidaya Masih Rendah

Kabupaten Batu Bara memiliki Panjang garis patai sebesar 62 km, tentunya itu merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan baik untuk usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Salah satu potensi perikanan yang potensial untuk dikembangkan adalah perikanan budidaya dikarenakan perikanan budidaya dapat direkayasa dengan penggunaan atau penerapan teknologi budidaya hasil dari riset atau penelitian yang terus berkembang.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara cukup besar yaitu seluas 5.277 Ha yang terdiri dari Potensi Budidaya Air Payau 4.030 Ha dan Air Tawar sebesar 1.247 Ha dengan kooditas unggulan seperti Udang, Ikan Kerapu, Ikan Lele, Ikan Gurane, Ikan Nila, Mas, Patin, Nila Salin, Bandeng, akan tetapi baru 55 % dari potensi tersebut yang dimanfaatkan untuk lokasi usaha budidaya perikanan. Sehingga mengakibatkan produksi perikanan budidaya masih rendah. Factor lain yang menyebabkan produksi perikanan masih rendah antara lain :

- a. Kurangnya Stok Benih dan Induk Unggul di Kabupaten Batu Bara sehingga pasokan benih dan induk ikan masih dari luar daerah ;
- b. Alih fungsi lahan budidaya khususnya lahan budidaya udang (tambak)
- c. Belum berkembangnya teknologi pembuatan pakan ikan mandiri
- d. Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk lokasi usaha budidaya ikan
- e. Masih rendahnya pengetahuan pembudidaya ikan akan teknologi budidaya ikan dan pasar serta akses permodalan

2. Belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap

Sebagai Kabupaten yang memiliki Panjang garis pantai sepanjang 62 km, Kabupaten Batu Bara tentunya memiliki potensi yang cukup besar khususnya dalam bidang perikanan tangkap, akan tetapi dalam 5 (lima) tahun terakhir, potensi yang besar tersebut belum dikelola secara optimal, hal ini bisa dilihat dari sumbangsih PDRB sub sektor perikanan terhadap PDRB hanya sebesar 3,37



% pada tahun terakhir periode renstra. Selain factor harga jual dan factor lainnya, produksi perikanan tangkap akan mempengaruhi terhadap pendapatan dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Batu Bara.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi belum optimalnya produksi perikanan tangkap antara lain :

- a. Efek dari penggunaan alat tangkap terlarang yang merusak ekosistem laut seperti matinya terumbu karang ;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap seperti Pabrik Es, Cold Storage, Pelabuhan Perikanan, SPBUN dll ;
- c. Kerusakan ekosistem hutan mangrove yang mana hutan mangrove sebagai tempat berkembang biak hewan-hewan laut
- d. Masih rendahnya penggunaan aplikasi teknologi penangkapan ikan
- e. Belum adanya industry pengolahan hasil perikanan
- f. Pertumbuhan kapal tidak dibarengi dengan perizinan yang lengkap

3. Masih Rendahnya Nilai Daya Saing Produk

Daya saing produk dapat diartikan kemampuan suatu produk atau komoditi masuk ke dalam pasar luar negeri atau dalam negeri dan kemampuan untuk bertahan dalam pasar tersebut. Di Kabupaten Batu Bara kegiatan pengolahan hasil perikanan masih sebatas industry rumahan yang masih menggunakan teknologi sederhana tanpa ada proses packing yang sederhana serta pemasaran hanya melalui agen-agen yang datang sehingga kurang memiliki daya saing dan sulit untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Factor yang dapat meningkatkan atau yang memiliki daya ungkit tinggi untuk meningkatkan daya saing produk perikanan adalah berkembangnya industry pengolahan.

Produk unggulan hasil pengolahan ikan di Kabupaten Batu Bara antara lain : Ikan Teri, Pindang Ikan Kembung / Kembung Rebus, Ikan Asin, Kepah Asin, Udang Kering, Terasi / Belacan, Kerupuk Ikan dll. Di Kabupaten Batu Bara terdapat juga Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bekerja sama dengan Perusahaan-perusahaan pengolah ikan yang tujuan pasarnya adalah ekspor dengan komoditas utama adalah daging kepiting dan cumi/sotong.

Factor-faktor yang mempengaruhi belum berkembangnya industry pengolahan hasil di Kabupaten Batu Bara antara lain :



- a. Belum adanya peta pengolahan hasil di Kabupaten Batu Bara yang memuat potensi serta produk-produk unggulan kabupaten
- b. Teknologi pengolahan masih sederhana
- c. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama pengolahan hasil perikanan akan peningkatan daya saing produknya
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang memadai

3.1.2 Permasalahan Bidang Peternakan

1. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dari sejumlah aktivitas yang berkesinambungan yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan rancangan produk, harga, promosi dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran sesuatu yang bernilai pada kelompok sasaran.

Pemasaran hasil produksi peternakan dan perkebunan berarti kegiatan bisnis dimana produk yang dipasarkan adalah berupa komoditi peternakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Komoditas tersebut memiliki sifat mudah rusak (*perishable*) dan jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif sedikit (*bulky*). Sifat tersebut akan mempengaruhi mekanisme pasar dalam pemasaran. Oleh karena itu, sering sekali terjadi harga produksi peternakan yang dipasarkan menjadi naik-turun (*berfluktuasi*) secara tajam sehingga sering menimbulkan kerugian di pihak peternak atau produsen. Karena kejadian semacam ini maka petani atau produsen memerlukan kekuatan untuk melaksanakan pemasaran ini.

Permasalahan lain yang menyebabkan belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian antara lain : lemahnya infrastruktur, lemahnya informasi pasar, skala pasar pertanian yang relatif kecil, kurangnya pengetahuan, misalnya grading dan standarisasi, tingginya biaya transaksi, lemahnya produsen (peternak) dalam memanfaatkan peluang pasar, produsen (peternak dan pekebun) melakukan usaha tidak berdasarkan pada permintaan pasar, melainkan karena usahatani yang diusahakan secara turun temurun.



2. Adanya ancaman penyakit yang strategis baik yang sporadi maupun exotis baik pada ternak besar, ternak kecil maupun unggas

Lalu lintas ternak antar kabupaten maupun antar propinsi memungkinkan adanya mutasi penyakit. Oleh karenanya, diperlukan adanya pengawasan lalulintas ternak oleh petugas kesehatan hewan terutama di perbatasan daerah.

3. Perlunya optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner

Dalam rangka optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner, diperlukan adanya pembangunan Rumah Potong Hewan sehingga konsumen akan mendapatkan produk bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan perikanan dan peternakan di Kabupaten Batu Bara antara lain :

1. Masih adanya potensi pengembangan perikanan terutama potensi perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut
2. Permintaan Komoditas Perikanan terus meningkat baik domestic maupun Eksport Komoditas perikanan
3. Lokasi kabupaten sebagai lokasi proyek strategis nasional akan berpengaruh terhadap permintaan pasar produk perikanan
4. Perikanan Budidaya masih bisa dikembangkan dengan memanfaatkan Lahan-lahan yang terbengkalai dan lahan pekarangan
5. Komoditas perikanan dapat diolah menjadi beberapa produkturnannya sehingga dapat meningkatkan nilai jual.
6. Sektor Industri Pengolahan bisa dikembangkan
7. Kebijakan Pemerintah Pusat, Provisi dan Daerah yang mendukung tentang pengembangan sector kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan.
8. Potensi sumber daya alam masih besar
9. Permintaan pasar akan hewan ternak cukup tinggi
10. Dapat diusahakan baik sebagai usaha utama maupun sampingan
11. Sumber Daya Manusia / petugas kesehatan hewan cukup memadai



1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan penjelasan umum organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja/penetapan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Batu Bara untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja. Untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan Analisis Capaian Kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

- **Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Oleh sebab itu, perlu analisis dalam menentukan sasaran strategis pembangunan sector kelautan dan perikanan dan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara tahun 2025 – 2029 yang dijabarkan melalui Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029. Dari hasil analisis tersebut dapat ditetapkan indikator-indikator utama dalam pembangunan perikanan dan indikator-indikator sasaran tersebut harus dicapai dengan kerja sama antar sektor sehingga tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara dapat tercapai.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 7 misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
2. Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi
5. Mewujudkan Masyarakat yang Giat Berbasis Religius, Berbudaya dan Berkarakter Kuat sebagai Pondasi Pembangunan Daerah.
6. Mendorong Inovasi dan Kreatifitas di Segala Bidang Pembangunan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.
7. Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah



Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun misi yang diamanatkan pencapaiannya pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara yaitu :

1. Misi ke 2 (dua) yaitu “Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah”, dengan tujuan yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi” dan sasaran yang ditetapkan “Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan”
2. Misi ke 7 (tujuh) yaitu “Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”, dengan tujuan yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 “Menurunnya Tingkat Kesenjangan” dan sasaran yang ditetapkan “Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan”.

Berdasarkan telaah permasalahan dan isu-isu strategis pengembangan perikanan dan peternakan, Dinas Perikanan dan Peternakan telah dirumuskan dan ditetapkan tujuan perencanaan strategis yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025-2029 adalah **Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan**. Tujuan tersebut diukur melalui Indikator sebagai berikut:

- a. Kontribusi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB, Tujuan utama dari pengukuran **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah untuk menyediakan data dan informasi yang komprehensif mengenai **kinerja ekonomi** suatu wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan menjadi dasar dalam proses perencanaan, evaluasi, serta perumusan kebijakan pembangunan ekonomi regional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan selama tahun 2025-2029 adalah:

- a. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan dengan indikatornya antara lain :
 1. Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB ;



2. Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan yang terdiri dari gabungan Perikanan Tangkap, Budidaya dan Produksi Pengolahan hasil Perikanan.
- b. Meningkatnya Produksi Ternak Unggulan dengan indikatornya :
1. Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB
 2. Produksi Daging Sapi
 3. Produksi Daging Kambing
 4. Produksi Daging Domba
 5. Produksi Telur
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikatornya :
1. Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan

Seluruh tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan yang ditargetkan pada tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

| No | Sasaran RPJMD | Tujuan / Sasaran | Indikator | Target Tahun | | | | | | Ket |
|----|--|--|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan | Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan | Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB | 22.84 | 23.42 | 23.49 | 23.57 | 23.64 | | |
| | | - Meningkatkan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Kontribusi Sub Sektor Perikanan Pada PDRB | 2,78 | 2,80 | 2,85 | 2,93 | 3,00 | 3,02 | |
| | | | Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan) | 5% | 8% | 10% | 13% | 15% | 17% | |
| | | - Meningkatkan Produksi Ternak Unggulan | Kontribusi Sub Sektor Peternakan Pada PDRB | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,03 | |
| | | | Produksi Daging Sapi | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 370 | |
| | | | Produksi Daging Kambing | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 48 | |
| | | | Produksi Daging Domba | 60 | 68 | 74 | 78 | 81 | 85 | |
| | | | Produksi Telur | 260 | 265 | 269 | 300 | 301 | 680 | |
| | | - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP OPD | 74,00 | 74,80 | 75,10 | 75,50 | 75,80 | 75,81 | |

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan kabupaten Batu Bara 2025-2029 tersebut, maka Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2025 atau periode awal Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029 telah menetapkan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang dituangkan kedalam Rencana Kerja yang didalamnya mencakup Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan. IKU merupakan komponen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). IKU memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan
2. Sebagai acuan dalam menyampaikan rencana kerja dan anggaran
3. Sebagai acuan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja
4. Sebagai acuan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja
5. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | Ket | |
|----|--|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kontribusi Sub Sektor Perikanan Pada PDRB | Nilai | 2,78 | 2,80 | 2,85 | 2,93 | 3,00 | 3,02 | |
| 2 | Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan) | Persen | 5% | 8% | 10% | 13% | 15% | 17% | |
| 3 | Kontribusi Sub Sektor Peternakan Pada PDRB | Nilai | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,03 | |
| 4 | Produksi Daging Sapi | Ton | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |
| 5 | Produksi Daging Kambing | Ton | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | |
| 6 | Produksi Daging Domba | Ton | 63 | 68 | 74 | 78 | 81 | 85 | |
| 7 | Produksi Telur | Ton | 620 | 630 | 650 | 660 | 670 | 680 | |
| 8 | Nilai AKIP OPD | Indeks | 74,00 | 74,80 | 75,10 | 75,50 | 75,80 | 75,81 | |



2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja, adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025- 2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.1.2. Target Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025

| No | Sasaran RPJMD | Tujuan / Sasaran | Indikator | Target 2025 |
|----------------|--|--|--|-------------|
| 1 | Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan | - Meningkatkan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Kontribusi Sub Sektor Perikanan Pada PDRB | 2,78 |
| | | | Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan) | 5% |
| | | - Meningkatkan Produksi Ternak Unggulan | Kontribusi Sub Sektor Peternakan Pada PDRB | 0,80 |
| | | | Produksi Daging Sapi | 480 |
| | | | Produksi Daging Kambing | 20 |
| | | | Produksi Daging Domba | 60 |
| | | - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Produksi Telur | 260 |
| Nilai AKIP OPD | 74,00 | | | |

Adapun program-program untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Batu Bara adalah sebagai berikut :

| No | Program | Pagu (Rp) | Ket |
|----|---|-----------------------|-----|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.879.130.024 | |
| 2 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 2.101.809.530 | |
| 3 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 935.030.020 | |
| 4 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 213.219.792 | |
| 5 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 210.455.000 | |
| 6 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 637.782.538 | |
| 7 | Program Penyuluhan Pertanian | 159.999.900 | |
| | Total | 12.137.456.804 | |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.



Tabel 3.1. Formula Pengukuran Kinerja dan Teknik Pengumpulan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULA |
|----------------|--|--|---|
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB | $\frac{\text{PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun } n}{\text{Total PDRB Seluruh Sektor Tahun } n} \times 100\%$ |
| | | | $\frac{\text{Volume Produksi Akhir} - \text{Volume Produksi Awal}}{\text{Volume Produksi Awal}} \times 100\%$ |
| | | Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan) | $\frac{\text{Volume Produksi Akhir} - \text{Volume Produksi Awal}}{\text{Volume Produksi Awal}} \times 100\%$ |
| | | | $\frac{\text{Volume Produksi Akhir} - \text{Volume Produksi Awal}}{\text{Volume Produksi Awal}} \times 100\%$ |
| 2 | Meningkatnya Ternak Unggulan Produksi | Kontribusi Sub Sektor Peternakan Pada PDRB | $\frac{\text{PDRB Sub Sektor Peternakan Tahun } n}{\text{Total PDRB Seluruh Sektor Tahun } n} \times 100\%$ |
| | | | $\frac{\text{PDRB Sub Sektor Peternakan Tahun } n}{\text{Total PDRB Seluruh Sektor Tahun } n} \times 100\%$ |
| | | Produksi Daging Sapi | Produksi Daging Sapi Tahun n |
| | | Produksi Daging Kambing | Produksi Daging Kambing Tahun n |
| | | Produksi Daging Domba | Produksi Daging Domba Tahun n |
| Produksi Telur | Produksi Telur Tahun n | | |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Nilai Evaluasi AKIP OPD dari Inspektorat Daerah |



Dasar pengukuran yang dipergunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KERJA |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | $91\% \leq 100\%$ | Sangat Tinggi |
| 2 | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3 | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4 | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5 | $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini :



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|--|--|--------|--------|-----------|-------|
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB | Persen | 2,78 | Na | |
| | | Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan) | Persen | 5 | 3,97 | 79,48 |
| 2 | Meningkatnya Produksi Ternak Unggulan | Kontribusi Sub Sektor Peternakan Pada PDRB | Persen | 0,80 | Na | |
| | | Produksi Daging Sapi | Ton | 700 | 729,41 | 104,2 |
| | | Produksi Daging Kambing | Ton | 20 | 19,06 | 95,3 |
| | | Produksi Daging Domba | Ton | 60 | 54,9 | 91,5 |
| | | Produksi Telur | Ton | 260 | 240,97 | 92,68 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Nilai | 80,20 | 80,20 | 100 |

Ket : Data PDRB belum di publikasi oleh BPS Kab. Batu Bara

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 5 (lima) diantaranya telah mencapai target dengan predikat **sangat tinggi**, 1 (satu) Indikator predikat Tinggi1 dan 2 (dua) indikator belum bisa di ukur dikarenakan nilai pdrd belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara. Artinya dapat dinyatakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 pada tingkat kategori **Sangat Tinggi** walaupun ada 2 (dua) indikator belum dapat dihitung.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

A. Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB

Sampai pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Nilai Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara.



Tabel 11. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB

| Indikator | Capaian Indikator Tahun 2024 | Target 2024 | Realisasi | Capaian |
|--|------------------------------|-------------|-----------|---------|
| Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB | 2,75 | 2,78 | n/a | n/a |

Tabel 12. Efisiensi Anggaran terhadap indikator Kinerja Kontribusi sub sektor Perikanan dalam PDRB

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Sat | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi (%) |
|--|--|-------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Meningkatnya Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Kontribusi sub sektor Perikanan dalam PDRB | Nilai | 2,78 | n/a | n/a | 3.250.089.342 | 3.170.458.861 | 97,55 | 0.85 |

Hasil perhitungan nilai efisiensi pada indikator Kinerja Kontribusi sub sektor Perikanan dalam PDRB menunjukkan nilai 0.85. pada kegiatan ini, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik namun pelaksanaan program kinerja belum berhasil mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan di dokumen perjanjian kinerja.

B. Persentase Kenaikan Volume Produksi Perikanan

Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan ini merupakan gabungan seluruh produksi perikanan yang meliputi total produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan total produksi hasil olahan perikanan. Indikator persentase peningkatan volume produksi perikanan bukan sekadar angka di atas kertas. Bagi pemerintah, pelaku bisnis, maupun akademisi, angka ini adalah "raport" kesehatan sektor kelautan dan perikanan.

Berikut adalah tujuan utama dari penggunaan indikator tersebut:

a. Mengukur Kinerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan paling dasar adalah untuk melihat sejauh mana sektor perikanan berkontribusi terhadap ekonomi nasional atau daerah.

- Tren Pertumbuhan: Mengetahui apakah sektor ini sedang berkembang, stagnan, atau justru menurun.



- Kontribusi PDRB: Menilai dampak sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

b. Evaluasi Kebijakan dan Program Kerja

Pemerintah sering meluncurkan program seperti bantuan benih, alat tangkap, atau pembangunan pelabuhan. Persentase peningkatan digunakan untuk menjawab pertanyaan: "*Apakah investasi dan kebijakan tersebut efektif?*"

Jika angka meningkat signifikan setelah adanya bantuan teknologi, maka program tersebut dianggap berhasil.

c. Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Produksi perikanan adalah sumber protein utama bagi masyarakat.

- Ketersediaan Suplai: Memastikan bahwa pasokan ikan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang terus bertambah.
- Stabilitas Harga: Produksi yang stabil dan meningkat cenderung menjaga harga ikan tetap terjangkau di pasar.

d. Dasar Perencanaan Strategis (Forecasting)

Dengan melihat pola peningkatan dari tahun ke tahun, pemangku kepentingan dapat memprediksi masa depan.

- Investasi: Membantu investor memutuskan apakah layak membangun pabrik pengolahan ikan di wilayah tertentu.
- Infrastruktur: Menentukan apakah diperlukan penambahan kapasitas gudang beku (*cold storage*) atau perluasan dermaga.

e. Pemantauan Keberlanjutan Sumber Daya

Meskipun peningkatan volume itu positif, indikator ini juga berfungsi sebagai "lampu kuning" bagi aspek konservasi.

- Jika volume produksi meningkat drastis melampaui **MSY (Maximum Sustainable Yield)** atau potensi lestari, maka indikator ini memicu perlunya pembatasan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan (*overfishing*).

Berdasarkan data total produksi perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara tahun 2025 ada peningkatan produksi sebesar 3,97 % dari total produksi perikanan tahun 2024. Adapun capaian indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



| Sasaran Strategis | Indikator | Capaian Produksi Tahun 2024 (Ton) | Target Peningkatan Tahun 2025 (%) | | Realisasi Tahun 2025 (%) | | Capaian Realisasi (%) |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | Total Produksi (Ton) | % Target | Produksi (Ton) | % Realisasi Target | |
| Meningkatnya Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap, Budidaya dan Produksi Hasil Olaham Perikanan) | 56.788,07 | 59.627,47 | 5 | 59.044,89 | 3,97 | 79,48 |

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, 2025

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasannya ada kenaikan produksi perikanan sebesar 3,97% dari total produksi perikanan tahun 2024.

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Target

Kenaikan produksi perikanan sebesar 3,97 % didapat dari beberapa sub produksi yaitu :

1. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, Panjang garis pantai Kabupaten Batu Bara adalah 62 km dengan 6 Kecamatan Pesisir yang berbatasan langsung dengan selat malaka serta jumlah nelayan sebanyak 20.497 orang sehingga memiliki potensi perikanan yang cukup besar khususnya perikanan tangkap.

Potensi perikanan tangkap yang cukup besar tersebut belum dapat dikelola secara maksimal. Sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara masih belum memadai seperti Cold Storage berkapasitas besar, Pabrik Es Balok dan perlengkapan / teknologi penangkapan ikan untuk nelayan. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas mutu hasil tangkapan rendah dan dapat menimbulkan penurunan harga apabila hasil tangkapan melimpah dan tidak dapat ditampung oleh cold storage. Pada tahun 2025 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara sebesar 53.231,68 Ton, bila dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 sebesar 51.870,10



Ton, artinya produksi tahun 2025 mengalami kenaikan produksi sebesar 1.361,58 Ton atau kenaikan 2,62%.

Keberhasilan Capaian Indikator Produksi Perikanan Tangkap didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan meningkatkan produksi perikanan tangkap. Pagu anggaran pelaksanaan program di tahun 2025 sebesar Rp. 2.101.809.530,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.009.830.472,- (97,43%).

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah produksi perikanan tangkap dan target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 55.000 ton. Produksi perikanan tangkap di tahun 2025 tercatat sebesar 53.231,68 ton atau 96,78%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang mengampu indikator ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 16. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

| Indikator | Produksi Tahun 2024 (Ton) | Target 2024 (Ton) | Realisasi Tahun 2024 (Ton) | Capaian (%) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| Produksi Perikanan Tangkap | 51.870,10 | 55.000 | 53.231,68 | 96,78 |

Sumber : Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara, 2025

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Pemberdayaan Nelayan Kecil

Bentuk kegiatan Pemberdayaan ini adalah pelatihan dan bimbingan teknis, pendampingan usaha perikanan tangkap serta pemberian bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas nelayan kecil sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan kecil. Target dari peningkatan kapasitas nelayan yaitu jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya baik dari segi teknis maupun non teknis yaitu sebanyak 1200 nelayan



dengan realisasi 1230 dengan dukungan dana sebesar Rp. 2.101.809.530,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.009.830.472,- (97,43%).

b) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelalangan Ikan (TPI)

Bentuk kegiatan berupa operasioanl pengelolaan Tempat Pelelangan ikan sebanyak 4 Unit yang terdiri dari TPI Tanjung Tiram, TPI Perupuk, TPI Lalang, TPI Medang Deras. Target dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan operasioal layanan TPI berupa Tempat Pendaratan Ikan dan Tempat Jual Beli Ikan selain itu target dari Kegiatan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ini adalah Retribusi TPI sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dengan **Realisasi Retribusi Rp. 33.000.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau (71,75 %)** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 38.949.530,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.855.000,- atau 99,76 %.

Selain faktor dukungan anggaran, faktor pemicu lainnya dalam tercapainya indikator kinerja Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap antara lain :

1. Adanya bantuan alat tangkap ramah lingkungan dari Dinas Perikanan Batu Bara, sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap seperti bantuan mesin, bantuan sampan, bantuan premi asuransi nelayan kepada nelayan-nelayan tradisional sehingga menggairahkan industry penangkapan di kabupaten batu bara baik yang bersumber dari APBD Kabupatenn Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
2. Permintaan pasar domestic maupun ekspor akan produk hasil tangkapan berupa Ikan Kembung, Cumi-cumi, Gurita dan kepiting rajungan mengakibatkan nelayan beralih untuk menangkap jenis ikan tersebut ;
3. Mulai bergeliatnya pasar ekspor khususnya untuk komoditas unggulan kabupaten batu bara seperti ikan Kembung, Cumi, Gurita, Rajungan, udang sehingga nelayan mulai beralih tangkapan ikan pada komoditas tersebut ;
4. Seiring beroperasinya TPI dan mulai berlakunya retribusi jasa usaha Tempat Pelalangan Ikan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 Dinas Perikanan melalui petugas TPI yang tersebar di 4 (empat) lokasi melakukan pencatatan hasil tangkapan ikan di gudang-gudang atau tangkahan sehingga dapat mengurangi hasil tangkapan ikan yang tidak tercatat (*unreported*) ;



a. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Produksi Perikanan Tangkap di Tahun 2025 memang mencapai target akan tetapi kenaikan produksi belum signifikan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor antara lain: penurunan populasi ikan akibat eksploitasi berlebihan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem laut yang mengganggu proses pemijahan, serta perubahan iklim yang memengaruhi pola migrasi ikan. Selain itu, faktor teknis seperti keterbatasan armada tangkap yang akibat kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar solar juga berperan besar dalam kegagalan pencapaian target produksi.

c. Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi pada produksi Perikanan Tangkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 18. Efisiensi Anggaran terhadap Indikator Kinerja Produksi Perikanan tangkap.

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|--------|-----------|-------|------------------|------------------|-------|------|
| Meningkatnya Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 55.000 | 53.231,68 | 96,78 | 2.101.809.530,00 | 2.046.935.472,00 | 97,39 | 0,96 |
|--|----------------------------|-----|--------|-----------|-------|------------------|------------------|-------|------|

Hasil perhitungan nilai efisiensi pada produksi perikanan tangkap menunjukkan nilai 0.96. pada kegiatan ini, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik walaupun belum mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan di dokumen perjanjian kinerja.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara terdiri dari Perikanan Budidaya Air Payau, Air Laut dan Air Tawar. Menurut Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, Potensi Perikanan Budidaya Air Payau Seluas 4.030 Ha, Budidaya Air Tawar 1.247 Ha dan Budidaya Air Laut seluas 330 Ha. Adapun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 19. Capaian Indikator Volume Produksi Perikanan Budidaya

| Indikator | Produksi Tahun 2024 (Ton) | Target 2023 (Ton) | Realisasi 2024 (Ton) | Capaian (%) |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Produksi Perikanan Budidaya | 3.120,41 | 3.900 | 3.912,83 | 100,33 |

Sumber : Data Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian indikator Produksi Perikanan Budidaya telah melampaui dari target kinerja yang telah ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,33%.



- b. Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka Produksi Perikanan Budidaya tahun 2025 mengalami pertumbuhan volume produksi yang cukup bagus sebesar 792,42 Kg dan telah melampaui target.

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu :
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan meningkatkan produksi perikanan tersebut, program ini dilaksanakan dengan pagu anggaran di tahun 2025 sebesar Rp 935.060.020,- dan terealisasi sebesar Rp 915.554.125,- (97,91%). Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah produksi perikanan budidaya dan target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 3.900 ton. Produksi perikanan budidaya di tahun 2025 tercatat sebesar 3.912,83 ton atau 100,33%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara sebagai upaya agar para pembudidaya ikan lebih berdaya dalam meningkatkan kemampuan budidaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui usaha budidaya ikan yang dijalani. Selain itu, melalui kegiatan ini, Dinas Perikanan dan Peternakan juga memberikan fasilitasi secara terbuka kepada masyarakat umum yang memiliki ketertarikan untuk berusaha di bidang budidaya melalui pendampingan, pembinaan dan pelatihan serta bantuan fasilitasi sarana prasarana budidaya. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 935.060.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 915.554.125,- atau sekitar 97,91%.



Selain Faktor dukungan kegiatan dan anggaran terdapat beberapa Faktor pemicu/pendorong keberhasilan peningkatan Volume produksi perikanan di Kabupaten Batu Bara adalah :

1. Berkembangnya budidaya Air Tawar terutama untuk budidaya ikan lele system kolam terpal dengan memanfaatkan lahan pekarangan
2. Mulai berkembangnya usaha budidaya kerang dara / Kerang Batu di Kabupaten Batu Bara
3. Mulai berkembangnya usaha budidaya udang vaname di Kabupaten Batu Bara yang ditandai adanya investor / perusahaan yang melakukan usaha Budidaya Udang Vanama di Kabupaten Batu Bara.
4. Mulai terbukanya perusahaan / pengusaha tambak udang akan data produksi budidaya udang vaname.
5. Berkembangnya usaha budidaya Udang Vaname Sistem terpal dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terlalu luas.
6. Efek dari stimulus berupa bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Budidaya Batu Bara yang bersumber dari dana APBD Kab. Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan utama untuk peningkatan produksi dan pendapatan pembudidaya
7. Kegiatan pelatihan, dan penyuluhan serta pendampingan usaha pada kelompok pembudidaya ikan
8. Permintaan pasar ekspor khususya untuk budidaya udang dan kerapu terus meningkat

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya baik budidaya air payau, air tawar dan air laut
2. Kurangnya pasokan benur udang vaname yang cukup diakibatkan belum adanya Unit Pembenihan/Hatchery Udang Vaname di Kabupaten Batu Bara sehingga masih mengandalkan pasokan dari Kabupaten lain.



3. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam menrapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
4. Terjadinya kenaikan harga pakan ikan sehingga menambah biaya produksi
5. Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya ikan dan udang yang diterapkan pembudidaya di Kabupaten batu Bara
6. Fluktuasi harga ikan terutama harga ikan lele yang mengakibatkan pembudidaya berhenti usaha dan beralih ke komoditas budidaya yang lain.

c. Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi pada produksi Perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 22. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja produksi perikanan budidaya.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----|-------|----------|--------|----------------|----------------|-------|------|
| Meningkatnya Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 3.900 | 3.912,83 | 100,33 | 935.060.020,00 | 915.554.125,00 | 97,91 | 0,99 |
|--|-----------------------------|-----|-------|----------|--------|----------------|----------------|-------|------|

Hasil perhitungan nilai efisiensi pada produksi perikanan budidaya menunjukkan nilai 0,99, pada kegiatan program ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dengan disertai hasil capaian indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

b. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Selain potensi perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Kabupaten Batu Bara memiliki potensi pengembangan usaha di bidang Pengolahan Hasil Perikanan baik pengolahan hasil dari produk perikanan tangkap maupun dari perikanan budidaya, sampai sejauh ini sektor pengolahan belum terkelola secara optimal padahal sektor pengolahan ini kalau dikelola secara optimal akan menjadi sumber ekonomi di wilayah pesisir sebagai sumber ekonomi utama maupun tambahan.

Dari data Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara tahun 2025 jumlah pengolah hasil perikanan di Kabupaten Batu Bara sebanyak 1.788 Orang, jumlah unit pengolahan ikan sebanyak 5 Unit, jumlah kelompok pengolahan sebanyak 25 Kelompok dengan hasil olahan unggulan berupa : Ikan Teri Nasi, Ikan Teri, Ikan Asin, Pindang Ikan / Kembang Rebus,



Kepah Asin, Terasi/Belacan, Abon Ikan, Kerupuk Ikan dll. Adapaun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan produksi hasil olahan produk perikanan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 23 Capaian Indikator Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

| Indikator Kinerja | Produksi Tahun 2024 (Ton) | Target 2025 (Ton) | Realisasi 2025 (Ton) | Pencapaian Target (%) |
|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Produksi Pengolahan Hasil Produk Perikanan | 1.797,56 | 1.900 | 1.900,38 | 100,02 |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian indikator kinerja Produksi Pengolahan Hasil Perikanan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian target sebesar 100,02 %
- b. Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka capaian Produksi Pengolahan Hasil Perikanan tahun 2025 mengalami pertumbuhan volume produksi yang cukup signifikan yaitu sebesar 102,82 Kg dan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Pencapaian Indikator Persentase peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan didukung oleh 1 (satu) program yaitu :

a) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi pengolah dan pemasar ikan, peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan, serta peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan dengan tujuan utama meningkatkan nilai ekonomis terhadap hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui peningkatan nilai tambah dalam wujud produk olahan. Selan itu, program ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang banyak ditemui dalam usaha, yakni pemasaran dan peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan. Pagu anggaran pelaksanaan program di tahun 2025 sebesar Rp. 213.219.792,- dan terealisasi sebesar Rp. 207.969.264,- (97,54%).



Indikator kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan. Capaian kinerja Jumlah Produksi Pengolahan Tahun 2025 adalah sebesar 1.900,38 Ton dari target sebesar 1.900 Ton.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam mendukung pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

a) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Bentuk dari kegiatan ini antara lain berupa pendampingan usaha dan pendampingan teknis tentang usaha pengolahan hasil perikanan yang bekerjasama dengan *stake holder* terkait anatara lain Dinas Kesehatan dan Keluarga Bencana, Dinas Koperasi dan UKM. Dalam kegiatan ini pada Tahun 2025 Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka *stunting* Kabupaten Batu Bara, kegiatan gemarikan dilaksanakan di daerah/Desa Lokasi Khusus (Lokus) Stunting yang telah ditetapkan oleh Bupati Batu Bara tahun 2024. Bentuk dari kegiatan gemarikan yang dilaksanakan yaitu membagikan Ikan Segar, serta olahan dari produk ikan kepada keluarga rentan stunting sebanyak 590 orang.

Faktor pemicu keberhasilan pencapaian target indikator peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan antara lain :

1. Banyaknya permintaan apasar akan produk hasil olahan perikanan terutama untuk produk Ikan Teri Nasi, Ikan Asin, Kepah Kering, Ikan Pindang dll dari pasar local maupun luar daerah ;
2. Mulai berkembangnya pasar digital sehingga meningkatkan permintaan pasar akan produk olahan hasil perikanan.
3. Adanya efek turunan dari melimpahnya hasil tangkapan di Kabupaten Batu Bara yang mengakibatkan rendahnya harga jual ikan segar sehingga ikan-ikan tersebut diolah menjadi ikan kering atau ikan asin
4. Dilakukannya kegiatan pendataan hasil terutama pendataan pada gudang/gudang pengolahan ikan teri nasi/teri medan serta perusahaan Unit Pengolahan Ikan di



Kabupaten Batu Bara sehingga dapat mengurangi kehilangan data produksi pengolahan yang tidak tercatat (*unreported*).

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun faktor penghambat dalam peningkatan volume produksi pengolahan hasil produk perikanan antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
2. Teknologi pengolahan hasil perikanan masih tradisional
3. Diversifikasi Produk olahan hasil perikanan belum beragam
4. Pengemasan produk hasil olahan masih sederhana sehingga belum menarik minat konsumen milenial
5. Masih banyaknya data hasil olahan yang belum terdata terutama di gudang/gudang pengolahan ikan teri nasi/teri medan akibat dipersulitnya akses masuk ke lokasi pengolahan tersebut.
6. Masih belum termanfaatkannya limbah hasil perikanan tangkap seperti ikan rucaah, kulit kepiting/rajungan sebagai produk olahan yang memiliki nilai jual/nilai tambah

c. Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi pada produksi Pengolahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 25. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja produksi hasil pengolahan ikan

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-------|----------|--------|----------------|----------------|-------|------|
| Meningkatnya Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan | Produksi Pengolahan Hasil Perikanan | Ton | 1.900 | 1.900,38 | 100,02 | 213.219.792,00 | 207.969.264,00 | 97,54 | 0,99 |
|--|-------------------------------------|-----|-------|----------|--------|----------------|----------------|-------|------|

Hasil perhitungan nilai efisiensi pada produksi hasil pengolahan ikan menunjukkan nilai 0,99. pada kegiatan program ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dengan disertai hasil capaian indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

C. Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB

Sampai pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Nilai Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara.



Tabel. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB

| Indikator | Capaian Indikator Tahun 2024 | Target 2024 | Realisasi | Capaian |
|---|------------------------------|-------------|-----------|---------|
| Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB | 0,77 | 0,80 | n/a | n/a |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Batu Bara, 2025

D. Produksi Daging (Sapi, Kambing, Domba) dan Produksi Telur

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan produksi ternak unggulan di Kabupaten Batu Bara adalah dengan menggunakan indikator produksi daging ternak unggulan di Kabupaten Batu Bara antara lain Produksi Daging Sapi, Produksi Daging Kambing, Produksi Daging Domba dan Produksi Telur. Berdasarkan data populasi ternak tahun 2025, diketahui bahwa potensi peternakan di Kabupaten Batu Bara cukup tinggi yaitu 29.525 ekor sapi, Kerbau 433 Ekor yang tersebar di setiap kecamatan dengan populasi tertinggi terdapat di Kecamatan Lima Puluh. Di samping itu populasi ternak ruminansia kecil juga cukup tinggi yakni sekitar 4.992 ekor kambing dan 37.670 ekor domba. Capaian dari Indikator Produksi Daging dan Produksi Telur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 26. Capaian Indikator Produksi Daging dan Produksi Telur

| Sasaran Strategis | Indikator | Capaian Tahun | Target 2025 (Ton) | Capaian n 2025 | Capaian Realisasi |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Meningkatnya Produksi Ternak Unggulan | Produksi Daging Sapi | 271,91 | 700 | 729,41 | 104,2 |
| | Produksi Daging Kambing | 27,34 | 20 | 19,06 | 95,3 |
| | Produksi Daging Domba | 53,44 | 60 | 54,9 | 91,5 |
| | Produksi Telur | 489,29 | 260 | 240,97 | 92,68 |

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, 2025

Berdasarkan data di atas, terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan produksi dari produksi tahun 2024 yaitu produksi daging kambing dan produksi telur yang mengalami penurunan produksi dari tahun 2024, hal ini dikarenakan terdapat 1 unit usaha ayam petelur yang sudah tutup sehingga target indikatornya tidak tercapai.

Indikator peningkatan produksi ternak unggulan ini didukung oleh 3 (tiga) program antara lain :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja nya adalah :

Tabel 27. Capaian Realisasi Indikator Peningkatan Produksi Ternak Unggulan

| Sasaran Strategis | Indikator | Capaian Tahun | Target 2025 (Ton) | Capaian 2025 | Capaian Realisasi |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Meningkatnya Produksi Ternak Unggulan | Produksi Daging Sapi | 271,91 | 700 | 729,41 | 104,2 |
| | Produksi Daging Kambing | 27,34 | 20 | 19,06 | 95,3 |
| | Produksi Daging Domba | 53,44 | 60 | 54,9 | 91,5 |
| | Produksi Telur | 489,29 | 260 | 240,97 | 92,68 |

Bentuk dari kegiatan ini adalah pemberian bantuan bibit ternak unggulan berupa bibit Bibit Itik, Bibit Ayam Kampung, serta pelaksanaan Insensinasi buatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan populasi ternak unggulan Kabupaten Batu Bara serta meningkatkan kualitas induk dan anakan ternak yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan produksi daging ternak unggulan dan produksi telur di Kabupaten Batu Bara. Selain bantuan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara, pada Tahun 2025 terdapat beberapa bantuan ternak yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bantuan dari Kementerian Pertanian. Data populasi ternak unggulan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel d bawah ini :

Tabel 28. Populasi Ternak Kabupaten Batu Bara tahun 2025.

| No | Jenis Hewan (Ekor) | Kecamatan | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------|-------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|----------|------------|--------------|---------|
| | | Sei Balai | Tanjung Tiram | Nibung Hangus | Talawi | Datuk Tanah Datar | Lima Puluh | Lima Puluh Pesisir | Datuk Lima Puluh | Air Putih | Sei Suka | Laut Tador | Medang Deras | |
| 1 | Sapi | 2.854 | 180 | 849 | 560 | 3.342 | 8.952 | 2.652 | 3.162 | 449 | 1.123 | 5.63 | 339 | 29.525 |
| 2 | Kerbau | 47 | 0 | 2 | 15 | 12 | 77 | 10 | 25 | 187 | 0 | 37 | 31 | 443 |
| 3 | Kambing | 327 | 80 | 150 | 76 | 682 | 221 | 165 | 157 | 274 | 16 | 2.378 | 396 | 4.992 |
| 4 | Domba | 2.231 | 44 | 371 | 173 | 3.041 | 8.901 | 573 | 1.810 | 2.111 | 1.499 | 14.242 | 2.674 | 37.670 |
| 5 | Babi | 144 | 0 | 220 | 242 | 128 | 46 | 83 | 145 | 516 | 177 | 293 | 188 | 2.182 |
| 6 | Ayam Broiler | 74.000 | 38.000 | 0 | 15.000 | 177.400 | 81.850 | 362.000 | 144.600 | 20.000 | 4.750 | 19.000 | 47.000 | 983.600 |
| 7 | Ayam layer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 11.400 |
| 8 | Itik | 2.627 | 630 | 1.545 | 3.611 | 2.344 | 1.373 | 4.144 | 2.101 | 10.443 | 453 | 1.573 | 5.213 | 36.057 |
| 9 | Ayam Lokal | 50.755 | 16.438 | 26.015 | 24.787 | 30.452 | 28.682 | 32.527 | 36.303 | 24.611 | 20.442 | 36.972 | 39.893 | 367.877 |

Pendananaan kegiatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantuan Peternakan melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah



Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengendalian dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2025 dengan pagu sebesar **Rp. 210.455.000,-**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.979.162,- atau 96,92%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No. | Kegiatan | Volume |
|-----|--------------------------------|---|
| 1. | Bantuan Ternak Ayam Kampung | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ayam Kampung 690 ekor (345 ekor x 2 KT) ✓ Multivitamin oral 30 botol (15 botol x 2 KT) ✓ Pelet ayam 30 zak (15 zak x 2 KT) ✓ Jaring kandang 180 m² (90 m² x 2 KT) |
| 2. | Bantuan Ternak Itik | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Itik 690 ekor (345 ekor x 2 TP-PKK) ✓ Multivitamin oral 30 botol (15 botol x 2 TP-PKK) ✓ Pelet itik 30 zak (15 zak x 2 TP-PKK) ✓ Jaring kandang 270 m² (135 m² x 2 TP-PKK) |
| 3. | Perlengkapan Inseminasi Buatan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nitrogen Cair 1500 liter (bagi Inseminator) ✓ Plastik Sheats (150 bungkus) ✓ Plastik Gloves (150 kotak) |
| 4. | Pendukung lainnya | <ul style="list-style-type: none"> ✓ SPPD dalam daerah (17 OH) |

2) Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan tujuan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular pada hewan serta mengawasi peredaran hewan dan produk hewan. Indikator dari Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Persentase Kasus Penyakit yang ditangani dengan target penanganan kasus sebesar 92 % dan terealisasi sebesar 85% dari kasus penyakit ternak yang ada di Kabupaten Batu Bara.

Bentuk dari pelaksanaan program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan diseluruh kecamatan dan desa yang ada Di Kabupaten Batu Bara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Hewan beserta petugas paramedik veteriner yang di tugaskan di setiap kecamatan. Adapun pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain Vaksinasi PMK pada hewan Sapi, Kerbau, Domba, Kambing dan Babi , Vaksinasi Rabies, Vaksinasi



LSD, Pemeriksaan Kebuntingan, Pemeriksaan Kesehatan Hewan, dll. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan dalam program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah pengawasan pemotongan hewan pada saat hari-hari besar keagamaan seperti pada saat sebelum bulan Ramadhan, menjelang bulan Ramadhan dan pada hari raya idhul adha.

Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk mendukung Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebesar Rp. 637.782.538,- dengan realisasi Rp. 625.034.220,- atau sebesar 98,00%. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No. | Kegiatan | Volume |
|-----|---|--|
| 1. | Pemeriksaan <i>ante-mortem</i> dan <i>post-mortem</i> oleh petugas keswan <ul style="list-style-type: none"> - 3 hari menjelang Ramadhan - 3 hari menjelang Idul Fitri - 1 hari menjelang Idul Adha - 3 hari pelaksanaan kurban | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Operasional 46 petugas pengawasan ✓ 46 baju pengawasan + 46 topi rimba ✓ 138 pisau cutter (3 pcs/petugas) ✓ 184 botol handsanitizer (4 pcs/petugas) ✓ 24 kotak gloves sekali pakai ✓ 24 kotak masker sekali pakai ✓ 28 blok blanko pemeriksaan |
| 2. | Sosialisasi Pemotongan Hewan dan Aplikasi Lalu Lintas HPM, sekaligus pemberian bantuan perlengkapan pemotongan hewan untuk 30 orang peserta. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 30 pisau sembelih + 30 cleaver knife ✓ 30 buah celemek ✓ 30 set seminar kit + 30 baju peserta ✓ 200 lembar brosure ✓ 1 buah (1x4 m) spanduk ✓ 1 kotak amplop putih pendek ✓ 31 nasi kotak + 31 snack ✓ 1 kotak air mineral ✓ 1 hari sewa gedung pertemuan ✓ Honorarium 2 orang Narasumber ✓ Uang saku 30 peserta |
| 3. | Bantuan perlengkapan pemotongan hewan : <ul style="list-style-type: none"> - Agen potong hewan - Panitia kurban | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 30 buah pisau sembelih ✓ 60 buah cleaver knife + 30 celemek ✓ 12.000 lembar plastic daging kurban ✓ 120 terpal plastik ✓ 1.000 lembar brosure ✓ Baliho dan spanduk (total 56 m2) ✓ 245 buah kalung sehat (ante-mortem) ✓ 120 botol desinfektan |
| 4. | Pendukung Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 7 buah pulpen + 7 rim kertas ✓ 15 OH SPPD Luar Daerah ✓ 190 OK SPPD Dalam Daerah |



3) Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan Sub Keegiatannya Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota. Sekolah Lapang yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 sebanyak 2 kegiatan antara lain :

- a) Sekolah Lapang Pengolahan Pakan Silase merupakan salah satu upaya pembinaan masyarakat/peternak dalam mengumpulkan dan/atau mengolah bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan dan/atau mendistribusikan pakan untuk ternak ruminansia secara berkelanjutan. Pakan Silase juga dapat digunakan sebagai cadangan pakan ketika musim kemarau. Fungsi dari pengembangan unit pengolahan pakan silase yaitu untuk memberdayakan kelompok yang melakukan usaha pengolahan pakan silase sehingga dapat menyediakan pakan silase untuk memenuhi kebutuhan pakan di kelompok dan/atau di lingkungan sekitarnya.

Sasaran Kegiatan Sekolah Lapang yaitu 2 (dua) Kelompok Ternak Ruminansia terpilih berdasarkan hasil verifikasi, dimana masing-masing kelompok ternak membawa 10 orang (terdiri atas anggota kelompok dan/atau peternak mandiri) untuk mengikuti Sekolah Lapang Pengolahan Pakan Silase, selain pelatihan, bentuk kegiatan ini antara lain pemberian bantuan mesin pembuat pakan silase atau mesin pencacah rumput / mesin chopper sebanyak 2 (dua) unit bagi 2 (dua) kelompok ternak.

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan bentuk kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Lapang pada Tahun 2024 di dukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 159.999.900,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 159.099.500,- atau 99,44%.

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Faktor pemicu / pendorong pencapaian kinerja peningkatan produksi ternak unggulan antara lain :

1. Adanya kesadaran peternak akan penerapan teknologi Insensinasi Buatan (IB) sehingga angka kelahiran ternak meningkat dibarengi dengan peningkatan genetic hewan ternak



2. Pelaksanaan vaksinasi PMK massive serta pelaksanaan pelayanan Kesehatan hewan secara berkala sehingga kasus PMK di Kabupaten Batu Bara dapat dikendalikan dan bahkan Kabupaten Batu Bara menjadi rujukan dalam penanganan PMK Provinsi Sumatera Utara
3. Faktor alami Kabupaten Batu Bara yang memiliki banyak perkebunan sebagai tempat menggembala ternak serta sebagai sumber hijauan pakan ternak
4. Sudah berkembangnya manajemen pakan ternak

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja

Faktor yang menghambat dalam pencapaian target kinerja peningkatan produksi ternak unggulan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 adalah adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta wabah Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang ternak ruminansia khususnya ternak Sapi, Kambing dan Domba. Serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Batu Bara terdeteksi pada awal bulan Mei dan penyebarannya kasusnya sangat cepat, total ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Batu Bara sebanyak 5.646 Ekor. Sampai akhir Bulan Desember 2025 total kasus PMK di Kabupaten Batu Bara adalah 0 (nol) Ekor artinya seluruh ternak yang terserang penyakit PMK telah sembuh 100%.

Dampak negative akibat adanya wabah PMK di Kabupaten Batu Bara adalah ketakutan masyarakat untuk mengkonsumsi daging terutama daging sapi, kambing dan domba, hal tersebut yang mengakibatkan rendahnya produksi daging tahun 2025.

Selain adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang melanda ternak di Kabupaten Batu Bara, faktor lain yang menghambat rendahnya produksi ternak unggulan adalah masih rendahnya peternak dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan.

c. Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi pada produksi peternakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 30. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja Produksi hasil peternakan unggulan.



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------|----------------|-------|------|
| Meningkatnya Produksi Ternak Unggulan | Produksi Daging Sapi | Ton | 700 | 729,41 | 104,20 | 210.455.000,00 | 203.979.162,00 | 96,92 | 1,03 |
| | Produksi Daging Kambing | Ton | 20 | 19,06 | 95,30 | 210.455.000,00 | 203.979.162,00 | 96,92 | 0,94 |
| | Produksi Daging Domba | Ton | 60 | 54,9 | 91,50 | 210.455.000,00 | 203.979.162,00 | 96,92 | 0,91 |
| | Produksi Telur | Ton | 260 | 240,97 | 92,68 | 210.455.000,00 | 203.979.162,00 | 96,92 | 0,92 |

Hasil perhitungan nilai efisiensi pada produksi peternakan unggulan menunjukkan nilai masing-masing 1,03, 0,94, 0,91 dan 0,92. pada kegiatan ini, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik namun pelaksanaan program kinerja belum berhasil mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan di dokumen perjanjian kinerja.

c. Nilai AKIP OPD

AKIP merupakan nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun hasil capaian dari nilai AKIP Dinas Perikanan Tahun 2024 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 31. Capaian Indikator Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan

| Indikator | Nilai AKIP 2024 (Nilai) | Target 2025 (Nilai) | Realisasi (Nilai) | Capaian (%) |
|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Nilai AKIP OPD | BB (75,1)) | 80,20 | 80,20 | 100 |

dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi AKIP oleh tim SAKIP Kabupaten Batu Bara, Dinas Perikanan dan Peternakan memperoleh nilai 80,20 dengan kategori A (memuaskan) dan telah mencapai target.



Faktor pemicu tercapainya target nilai AKIP ini adalah adanya komitmen Kepala Dinas untuk memperbaiki mulai dari identifikasi masalah melalui pohon kinerja, penetapan indikator, pendelagasian kinerja (cascading), pengalokasian anggaran sesuai dengan target kinerja, melakukan kontrak kerja sampai pada evaluasi capaian kinerja secara berkala. Selain itu juga meningkatnya nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan tidak lepas dari Tim AKIP Kabupaten Batu Bara yang terus melakukan pembinaan dan perbaikan sehingga nilai AKIP OPD dan Nilai AKIP Kabupaten mengalami peningkatan.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target nilai AKIP OPD adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran ASN tentang pentingnya Akuntabilitas Kinerja yang telah disepakati melalui perjanjian kinerja, faktor lain yang menghambat pencapaian kinerja adalah perjanjian kinerja hanya sampai pada level eselon III (tiga) belum pada level perjanjian kinerja individu.

Dari analisis faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan untuk mencapai tujuan / target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dapat disimpulkan bahwasannya peluang dalam pengembangan usaha di bidang perikanan masih cukup terbuka lebar apabila dikelola dengan maksimal dengan didukung oleh program/kegiatan yang menjawab tantangan dan permasalahan yang ada dalam upaya peningkatan produksi serta peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara serta harus didukung oleh seluruh *Stake Holder* demi untuk mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Batu Bara khususnya Masyarakat yang bermata pencaharian pada sektor perikanan dan peternakan.

Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk mendukung indikator peningkatan Nilai AKIP OPD adalah Program Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 7.879.130.024,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.570.331.745,- atau sebesar 96,08%.

Nilai efisiensi anggaran pada indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 32. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja nilai AKIP.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|------|------|--------|------------------|------------------|-------|------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Nilai | 80,2 | 80,2 | 100,00 | 7.879.130.024,00 | 7.570.331.745,00 | 96,08 | 0,99 |
|--|------------|-------|------|------|--------|------------------|------------------|-------|------|



Hasil nilai efisiensi pada indikator kinerja nilai AKIP adalah sebesar 0,99. pada kegiatan program ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dengan disertai hasil capaian indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2024



| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja (Outcome/ Output) | Target | | | Realisasi | | | % | |
|---|--|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|---------|--------|
| | | Kinerja | | Rp. | Kinerja | | Rp. | Kinerja | Rp. |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan | 80,20 | Nilai | 7.879.130.024 | 80,20 | Nilai | 7.570.331.745 | 100 | 96,08 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | Persen | 23.564.280 | 100 | Persen | 13.685.000 | 100 | 58,08 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | Dokumen | 15.702.368 | 4 | Dokumen | 6.710.000 | 100 | 42,73 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | Dokumen | 7.861.912 | 2 | Dokumen | 6.975.000 | 100 | 88,72 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | Persen | 6.442.734.641 | 100 | Persen | 6.295.876.673 | 100 | 97,72 |
| Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 61 | Orang | 6.442.734.641 | 61 | Orang | 6.295.876.673 | 100 | 97,72 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Cakupan Kegiatan Administrasi Umum | 100 | Persen | 181.976.123 | 100 | Persen | 149.581.105 | 100 | 82,20 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 | Jenis | 44.335.995 | 4 | Jenis | 41.297.450 | 100 | 93,15 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | Paket | 14.644.026 | 2 | Paket | 14.616.000 | 100 | 99,81 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | Paket | 2.530.000 | 3 | Paket | 2.530.000 | 100 | 100,00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | Paket | 41.180.102 | 2 | Paket | 29.739.350 | 100 | 72,22 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | Dokumen | 20.400.000 | 12 | Dokumen | 20.400.000 | 100 | 100,00 |
| Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Laporan | 58.886.000 | 12 | Laporan | 40.998.305 | 100 | 69,62 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Cakupan kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah | 100 | Persen | 115.200.000 | 100 | Persen | 114.718.500 | 100 | 99,58 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 1 | Unit | 67.200.000 | 1 | Unit | 67.099.500 | 100 | 99,85 |
| Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 | Unit | 48.000.000 | 5 | Unit | 47.619.000 | 100 | 99,21 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|-----------|--------|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Cakupan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 956.934.980 | 100 | Persen | 857.107.643 | 100 | 89,57 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Laporan | 8.000.000 | 12 | Laporan | 8.000.000 | 100 | 100,00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 149.212.980 | 12 | Laporan | 100.055.643 | 100 | 67,06 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 799.722.000 | 12 | Laporan | 749.052.000 | 100 | 93,66 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | Persen | 158.720.000 | 100 | Persen | 139.362.824 | 100 | 87,80 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 | Unit | 136.620.000 | 28 | Unit | 120.277.824 | 100 | 88,04 |
| Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 | Unit | 22.100.000 | 15 | Unit | 19.085.000 | 100 | 86,36 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi Perikanan Tangkap | 55.000 | Ton | 2.101.809.530 | 53.231,68 | Ton | 2.046.935.472 | 96,78 | 97,39 |
| Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentasi Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 | Persen | 2.062.860.000 | 100 | Persen | 2.008.080.472 | 100 | 97,34 |
| Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 1000 | Orang | 2.062.860.000 | 1000 | Orang | 2.008.080.472 | 100 | 97,34 |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Persentase Cakupan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI | 100 | Persen | 38.949.530 | 100 | Persen | 38.855.000 | 100 | 99,76 |
| Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 12 | Layanan | 38.949.530 | 12 | Layanan | 38.855.000 | 100 | 99,76 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi Perikanan Budidaya | 3.900 | Ton | 935.060.020 | 3.912,83 | Ton | 915.554.125 | 100,32897 | 97,91 |
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 100 | Persen | 935.060.020 | 100 | Persen | 915.554.125 | 100 | 97,91 |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia | 29 | Unit | 935.060.020 | 9 | Unit | 915.554.125 | 31,034483 | 97,91 |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Produksi Pengolahan Hasil Produk Perikanan | 1.900 | Ton | 213.219.792 | 1.900,38 | Ton | 207.969.264 | 100,02 | 97,54 |
| Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase cakupan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 | Persen | 213.219.792 | 100 | Persen | 207.969.264 | 100 | 97,54 |
| Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.900 | ton | 213.219.792 | 1.900 | Orang | 207.969.264 | 100,02 | 97,54 |



| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|------------|-------|
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produksi Ternak Unggulan Kabupaten | | | 1.008.237.438 | | | 988.112.882 | | 97,54 |
| | Daging Sapi | 700 | Ton | | 729,41 | Ton | | 104,201429 | |
| | Daging Kambing | 20 | Ton | | 19,06 | Ton | | 95,3 | |
| | Daging Domba | 60 | Ton | | 54,9 | Ton | | 91,5 | |
| | Telur Ayam | 260 | Ton | | 240,97 | Ton | | 92,6807692 | |
| Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Cakupan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 100 | Persen | 210.455.000 | 100 | Persen | 203.979.162 | 100 | 96,92 |
| Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia | 690 | Ekor | 210.455.000 | 690 | Ekor | 203.979.162 | 100 | 96,92 |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Kasus Penyakit yang ditangani | 92 | Persen | 637.782.538 | 124,27 | Persen | 625.034.220 | 135,1 | 98,00 |
| Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 | Persen | 444.499.974 | 100 | Persen | 432.618.220 | 100 | 97,33 |
| Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 12 | Laporan | 444.499.974 | 12 | Laporan | 432.618.220 | 100 | 97,33 |
| Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 100 | Persen | 193.282.564 | 100 | Persen | 192.416.000 | 100 | 99,55 |
| Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 1 | Laporan | 193.282.564 | 1 | Laporan | 192.416.000 | 100 | 99,55 |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Kelompok Peternakan yang menerapkan Saptas Usaha Peternakan | 47 | Persen | 159.999.900 | 102 | Persen | 159.099.500 | 217,02 | 99,44 |
| Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Persentase Cakupan Kegiatan Penyuluhan Pertanian | 100 | Persen | 159.999.900 | 100 | Persen | 159.099.500 | 100 | 99,44 |
| Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tigkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Ternak yang terbentuk dan beroperasi | 2 | Unit | 159.999.900 | 2 | Unit | 159.099.500 | 100 | 99,44 |
| | Jumlah Total | | | 12.137.456.804 | | | 11.728.903.488 | | 96,63 |



Jumlah anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 12.137.456.804,-** dengan realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar **Rp. 11.728.903.488,-**. Dengan demikian dapat dilihat rata-rata pencapaian realisasi anggaran sebesar **96,63 %** dengan nilai realisasi serapan anggaran **Sangat Tinggi**. Sebagai perbandingan, realisasi anggaran pada tahun 2025 dengan realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 dan Tahun 2025

| TA. 2024 | | | TA. 2025 | | |
|------------------|------------------|------------|----------------|----------------|------------|
| Anggaran | Realisasi | Persentase | Anggaran | Realisasi | Persentase |
| 20.245.410.008,- | 19.532.265.084,- | 96,48 | 12.137.456.804 | 11.728.903.488 | 96,63 |

Factor pendorong keberhasilan realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah kerjasama antara semua bidang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dalam merealisasikan program / kegiatan serta rendahnya pengembalian (*Silva*) yang bias disimpulkan bahwasannya terjadi kesesuaian antara rencana program/kegiatan dengan realisasi program/kegiatan pada tahun 2025.

Factor yang menghambat dalam realisasi anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 adalah lambatnya penyerapan anggaran sehingga penyerapan anggaran yang besar terjadi pada triwulan III dan IV. Dengan demikian diharapkan untuk tahun selanjutnya kendala-kendala seperti tersebut diatas tidak terjadi lagi sehingga realisasi anggaran dapat sesuai dengan rencana realisasi yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran akhir tahun dapat lebih tinggi atau sama dengan tahun ini.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan tahun-tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan daerah agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada dan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan dan pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang semakin maju dan modern serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, kompetensi dan mampu bersaing menghadapi era digitalisasi dan informasi.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara, Laporan Kinerja (LK) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya Laporan Kinerja tahun 2025 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Disadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja tahun 2023 ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala/permasalahan. Meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja periode selanjutnya. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.